

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, dunia bisnis Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas ekonomi mengalami suatu stagnasi sejak dilanda krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Keadaan ini dipicu oleh fluktuasi mata uang yang menyeret perekonomian ke dalam suatu turbulensi yang kemudian ternyata menyerang segala sendi aktivitas masyarakat Indonesia. Tetapi hal ini tidak menutupi kemajuan di berbagai bidang, yang meliputi bidang ekonomi, teknologi, sosial yang telah dialami sampai menjadi negara berkembang seperti saat ini. Kondisi yang menimpa Indonesia ini tidak menghentikan usaha berbagai pihak termasuk pemerintah untuk terus memperbaiki dan mengembangkan berbagai sumber daya yang telah dimilikinya.

Dalam menghadapi situasi perekonomian dan persaingan bisnis yang semakin ketat seperti ini, setiap perusahaan dituntut untuk dapat mengoptimalkan prestasinya baik dalam kinerja maupun mutu produk yang dihasilkan. Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi dengan mengendalikan operasi perusahaan secara efektif dan efisien dengan tidak mengabaikan mutu kepada konsumennya. Untuk mewujudkan perekonomian yang seperti itu diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Seperti halnya perusahaan-perusahaan lain yang

Bab I Pendahuluan

mengendalikan kualitas sumber daya manusia dan teknologi sebagai keunggulan daya saing maka Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat sebagai lembaga pemerintahan yang melayani dan mengelola tanah perkebunan milik negara, harus mampu memberikan hasil-hasil perkebunan yang baik dengan biaya rendah tetapi mutu terjamin.

Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat sebagai instansi pemerintahan yang melayani masyarakat dan mengelola tanah perkebunan milik negara khususnya daerah Jawa Barat, memiliki hambatan-hambatan yang tidak terkendali seperti faktor teknis dan nonteknis serta sumber daya manusia yang kurang memadai. Keterbatasan pimpinan dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Dinas Perkebunan adalah merupakan hal yang wajar, karena seorang pemimpin pelaksana kegiatan hanya mampu mengawasi suatu pekerjaan dalam batasan-batasan tertentu. Dengan demikian dibutuhkan suatu alat bantu bagi pimpinan untuk dapat mengendalikan kegiatan dengan baik yaitu dengan adanya penetapan anggaran biaya. Anggaran biaya ini bertujuan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan antara biaya yang dianggarkan dengan realisasi biaya. Dengan adanya penyusunan anggaran biaya, diharapkan pimpinan dapat secara transparan dan objektif menilai tanggung jawab dan prestasi bawahannya atas tugas yang didelegasikan kepadanya sehingga akan membantu manajemen dalam mencapai tujuan secara keseluruhan.

Penilaian kinerja dengan menggunakan anggaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi biaya yang dikeluarkan dengan target biaya yang ditetapkan pada periode anggaran tersebut. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja dapat

Bab I Pendahuluan

dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi para pelaksana anggaran untuk mencapai target. Kejelasan sistem penilaian kinerja sangat diperlukan bagi setiap karyawan dan setiap manajer sehingga mengetahui bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan.

Salah satu alat yang dibutuhkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat dalam mengatur dan merencanakan biaya kegiatan adalah dengan anggaran biaya. Dinas Perkebunan membuat anggaran biaya dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk beberapa periode. Untuk mendapatkan suatu anggaran yang tetap dan sesuai dengan kondisi baik itu intern maupun ekstern perusahaan diperlukan suatu prosedur penyusunan anggaran yang cermat dan dapat digunakan sebagai standar pengukuran kinerja manajer. Untuk mencapai sasaran dan tujuan dari penyusunan anggaran, suatu organisasi harus menyusun dokumen anggaran sesuai dengan pedoman dan prosedur penyusunan yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya sering terdapat perubahan atau pergeseran dokumen anggaran biaya kegiatan dikarenakan realisasi dari biaya kegiatan telah melebihi anggaran yang telah ditetapkan pada dokumen anggaran yang telah disahkan oleh gubernur. Sedangkan seharusnya, jika penyusunan anggaran dilakukan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ada maka jumlah realisasi biaya kegiatan akan sama dengan jumlah anggarannya. Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana pengaruh efektifitas prosedur penyusunan anggaran biaya kegiatan terhadap kualitas kinerja pimpinan pelaksana kegiatan.

Bab I Pendahuluan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan memenuhi skripsi dengan judul: **”Pengaruh Efektivitas Prosedur Penyusunan Anggaran Biaya kegiatan Terhadap Kualitas Kinerja Pimpinan Pelaksana kegiatan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat berkaitan dengan prosedur penyusunan anggaran biaya kegiatan terhadap kualitas kinerja pimpinan pelaksana kegiatan. Adapun masalah-masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran biaya kegiatan pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana kualitas kinerja pimpinan pelaksana kegiatan pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat.
3. Seberapa besar pengaruh efektivitas prosedur penyusunan anggaran biaya kegiatan terhadap kualitas kinerja pimpinan pelaksana kegiatan pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat.

Bab I Pendahuluan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai pengaruh efektivitas prosedur penyusunan anggaran biaya kegiatan terhadap kualitas kinerja pimpinan pelaksana kegiatan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyusunan anggaran biaya kegiatan pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas kinerja pimpinan pelaksana kegiatan pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas prosedur penyusunan anggaran biaya kegiatan terhadap kualitas kinerja pimpinan pelaksana kegiatan pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun pihak-pihak yang kiranya dapat mengambil manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh efektivitas prosedur penyusunan anggaran biaya kegiatan terhadap kinerja pimpinan pelaksana kegiatan dalam suatu organisasi di instansi pemerintahan, khususnya pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat. Disamping itu juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh

Bab I Pendahuluan

Sidang Sarjana Lengkap dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi perusahaan digunakan sebagai bahan masukan yang berguna dalam melakukan perbaikan-perbaikan prosedur penyusunan anggaran biaya kegiatan terhadap kualitas kinerja pimpinan pelaksana kegiatan. Dengan adanya prosedur penyusunan anggaran yang tepat, maka akan mempengaruhi secara signifikan kualitas kinerja pimpinan pelaksana kegiatan.
3. Bagi pihak lain diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang lebih lanjut dengan tema yang sama.